

**PROSEDUR AUDIT OPERASIONAL TERHADAP DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI
SUL-SEL**

SKRIPSI

Oleh

AKMALUL KHAIR

105720555515



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PROSEDUR AUDIT OPERASIONAL TERHADAP DINAS PERUMAHAN

KAASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROVINSI SULAWESI-SELATAN

SKRIPSI

Oleh

Akmalul khair

Nim 105720555515

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

09/01/2020

1 eq
Smb- Alumni

R/007/MAV/2020

KHA

P¹



PERSEMBAHAN

Untuk Bapak, Ibu, dan kakak-kakakku tercinta, Teman-teman satu perjuangan,
Yang selalu terangi jiwaku dengan senyumnya, Almamaterku.

MOTTO HIDUP

“Kerendahan Hati bukan berarti kamu berfikir dirimu kecil, tetapi memikirkan
sedikit tentang dirimu (Ken Blau Chard)”

“jangan memperdulikan apa yang orang pikirkan dan kau akan selalu menjadi
tahanan mereka.”



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Prosedur Audit Operasional Terhadap Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi
Selatan
Nama Mahasiswa : **Akmalul Khair**
No Stambuk/NIM : 105720555515
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk
dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi strata satu (S1) Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
Pada Hari Senin Tanggal 21 Oktober 2019.


Makassar, 21 Oktober 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Agus Salim HR, SE., MM.
NIDN: 0911115703


Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP
NIDN: 0915058801

Diketahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua,
Program Studi Manajemen


Muh. Nur Rasyid, SE., MM
NBM: 1085576



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Akmalul Khair** Nim : **105720555515**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0015/SK-Y/61201/091004/2019 M, Tanggal 22 Shafar 1441 H / 21 Oktober 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Shafar 1441 H
21 Oktober 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM. (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM. (.....)
2. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak.CA.CSP (.....)
3. Dr. Akhmad, SE., M.Si. (.....)
4. Syafaruddin, SE., MM. (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM

NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Akmalul Khair**

Stambuk : 105720555515

Program Studi : Manajemen

Dengan Judul : Prosedur Audit Operasional Terhadap Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi
Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri,
bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima
sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.


Makassar, 21 Oktober 2019

Yang membuat Pernyataan,


Akmalul Khair

Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua,
Program Studi Manajemen


Muh. Nur Rasyid, SE., MM
NBM: 1085576

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta atas Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “***Prosedur Audit Operasioanal Terhadap dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan.*** Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dorongan baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H,Abd,Rahman Rahim selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong,SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh Nur Rasyid,.SE.,MM.selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. Agus Salim HR, SE.,MM selaku pembimbing 1 yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan sehingga sampai selesai dengan baik.
5. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si. Ak. CA. CSP selaku pembimbing II yang telah berkenang membantu dalam penyusunan skripsi inii.
6. Bapak,Kepala dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan.
7. segenap staff dan pegawai fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Rekan-rekan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis program studi manajemen angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi pemula.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini mendapat balasan dari Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

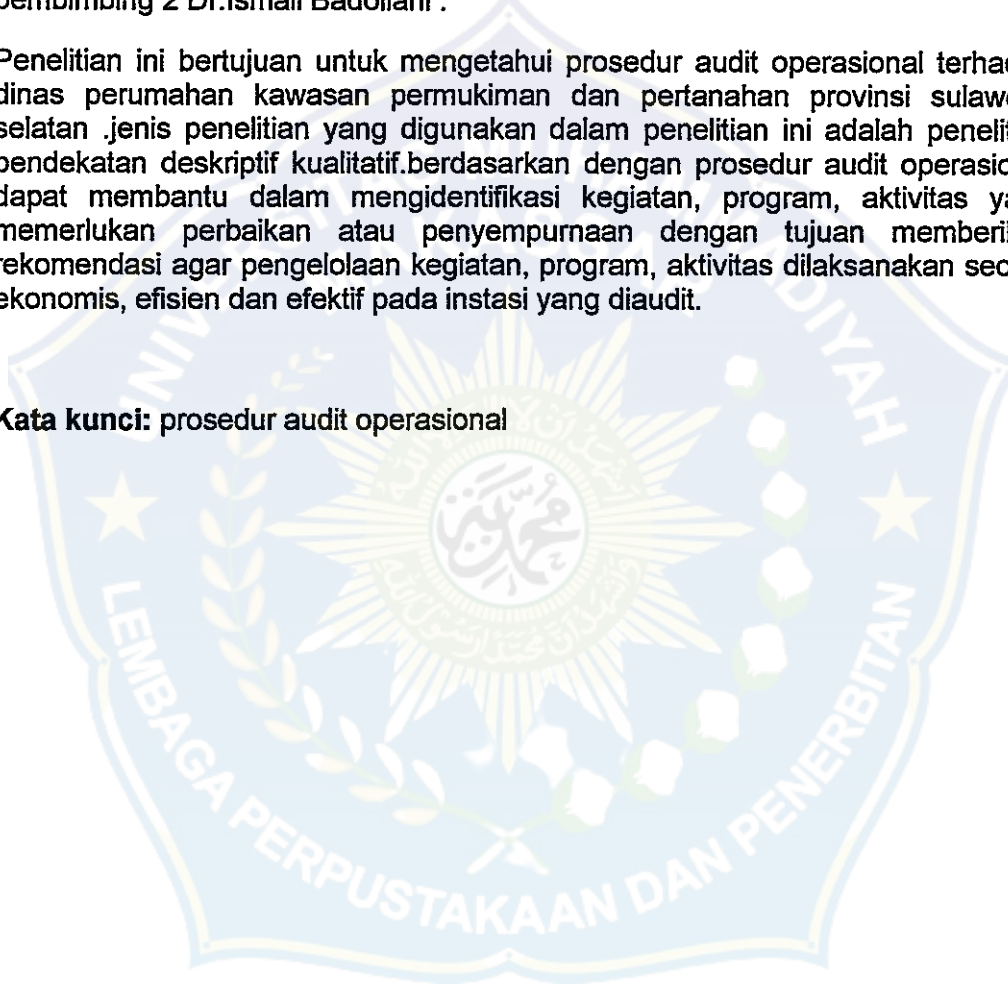


ABSTRAK

Akmalul khair, tahun 2019 prosedur audit operasional terhadap dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinnsi Sulawesi selatan, skripsi program studi manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Makassar . dibimbing oleh pembimbing 1,Dr Agus Salim. dan pembimbing 2 Dr.Ismail Badollahi .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur audit operasional terhadap dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi sulawesi-selatan .jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan deskriptif kualitatif.berdasarkan dengan prosedur audit operasional dapat membantu dalam mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan kegiatan, program, aktivitas dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif pada instasi yang diaudit.

Kata kunci: prosedur audit operasional

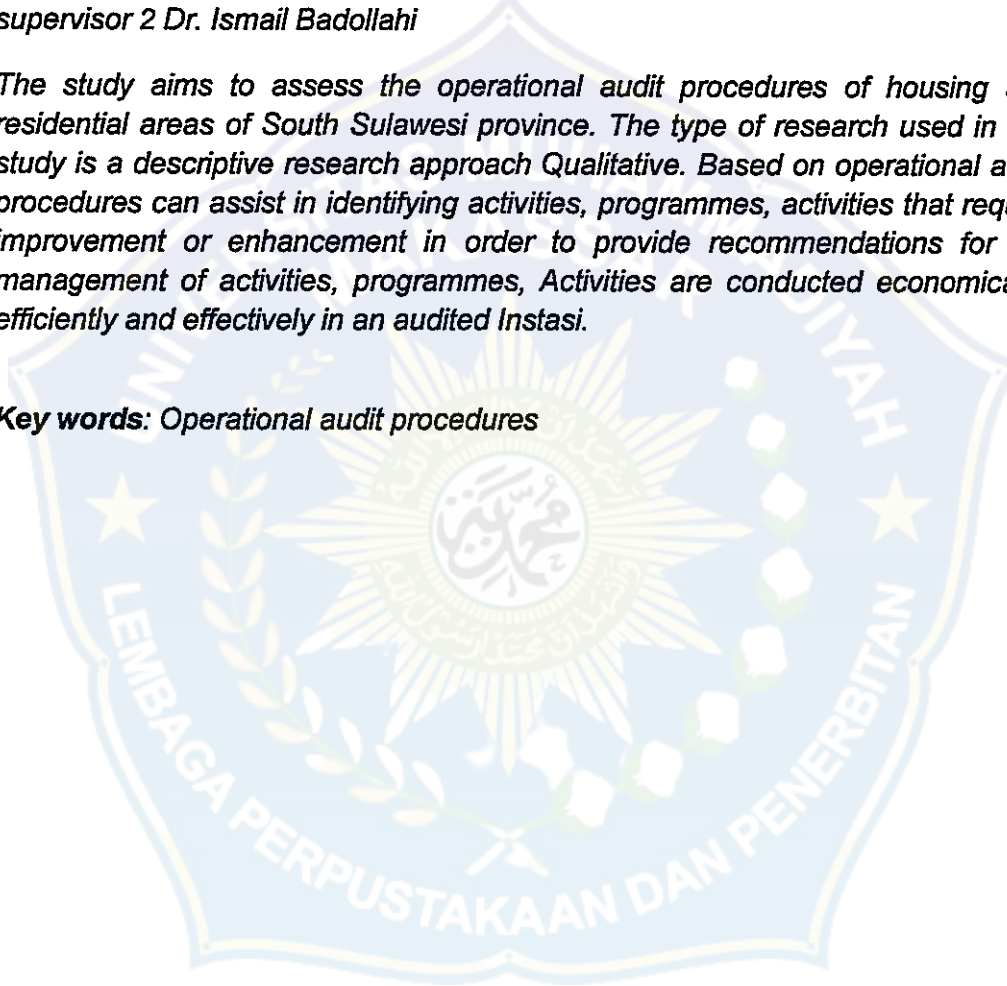


ABSTRACK

kmalul Khair, year 2019 operational audit procedures against the housing service of residential areas and land of South Sulawesi Province, the thesis program of Management study, the Faculty of Economics and Business of the University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Supervisor 1, Dr Agus Salim. and supervisor 2 Dr. Ismail Badollahi

The study aims to assess the operational audit procedures of housing and residential areas of South Sulawesi province. The type of research used in this study is a descriptive research approach Qualitative. Based on operational audit procedures can assist in identifying activities, programmes, activities that require improvement or enhancement in order to provide recommendations for the management of activities, programmes, Activities are conducted economically, efficiently and effectively in an audited Instasi.

Key words: Operational audit procedures



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Tujuan Penelitian.....	4
4. Mamfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
1) Audit Operasional	6
2) Prosedur pelaksanaan Audit Operasional	10
3) Peran Auditor.....	16
B. Penelitian Terdahulu.....	16
C. Keranga Konsep.....	18

D. Hipotesis	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Fokus Penelitian	20
3. Lokasi Dan Situs Penelitian	20
4. Sumber Data	20
5. Pengumpulan Data	21
6. Instrumen Penelitian	21
7. Teknik Analisis	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Gambaran umum objek penelitian	25
1. Sejarah Singkat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan	25
2. Tujuan Didirikanya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan	26
3. Visi dan misi organisasi	27
B. Hasil penelitian	31
C. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan audi operasional	39

D. Peran auditor pelaksanaan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan	40
E. Pembahasan	41
BAB V PENUTUP	45
A. Simpulan	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka fikir	18
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	28



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berbicara tentang ekonomi tidak lepas dari ilmu pengetahuan yang menyangkut beberapa komponen didalamnya, tumbuh dan berkembangnya perekonomian tergantung pada instrumen-instrumen yang cukup berperan dalam mengembangkan dan menumbuhkan kehidupan perekonomian.

Dalam era sekarang perkembangan baik pemerintahan negeri terutama pada instansi menjadi hal yang sangat penting dalam mengukur frekuensi ekonomi suatu negara. Keuangan menjadi tulang punggung dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pegawai dan karyawan yang tidak dapat dielakkan lagi semakin lama. Semakin berkembangnya suatu instansi menuntut pula perkembangan di bidang pemeriksaan.

Untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, produktifitas kerja suatu perusahaan, dibutuhkan kehadiran dan keberadaan suatu kelompok manajemen puncak yang memiliki ketangguhan dalam menentukan tujuan filsafat, strategi akbar dan budaya organisasi yang penting. disamping itu masih diperlukan manajemen operasional yang tangguh dan handal karena pada analisa terakhir, semua hal yang telah disinggung diatas bermuara dan diuji operasionalnya. strategi akbar dan strategi induk harus dirinci menjadi strategi dasar sebagai pedoman dan pegangan dalam menyelenggarakan semua jenis dan bentuk kegiatan operasional. dengan kata lain, apakah instansi mampu menampilkan produktifitas kerja yang tinggi atau tidak akan terlihat dalam penyelenggaraan seluruh aktifitas yang sifatnya operasional (siagian, 2012:215).

Menurut Arens (2005:110), Audit operasional itu sendiri merupakan suatu proses pemeriksaan sistematis yang dilaksanakan oleh pemeriksa *independent* untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif. Secara tidak langsung audit operasional juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mendeteksi kemungkinan yang dapat memicu timbulnya kehilangan dan penyelewengan yang pada akhirnya dapat merugikan instansi, tapi instansi ini bisa dikatakan 100% tidak ada penyelewengan dalam manajemen keuangan tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya pemeriksaan keuangan saja tetapi juga pemeriksaan yang menekankan penilaian sistematis dan objektif serta berorientasi pada tujuan untuk memperoleh keyakinan tentang keefektifan dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Pimpinan memerlukan audit operasional yang menyajikan informasi mengenai aktivitas operasional instansi dan tidak terbatas pada informasi keuangan dan akuntansi saja. Suatu sistem yang dikendalikan dengan efektif terletak pada sikap manajemen.

Audit operasional ataupun pengawasan intern merupakan kebijakan dari prosedur spesifikasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang Jurnal memadai bagi manajemen, bahwa sasaran dan tujuan penting bagi manajemen dapat dipenuhi. Menurut Sukrisno Agoes (2004) Audit manajemen, disebut juga operasional audit, audit fungsional, audit sistem, adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis."

Dalam instansi pemerintahan baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, juga harus meningkatkan kinerja manajemen operasionalnya, dalam pencapaian tujuannya, tidak beda jauh dengan perusahaan, instansi pemerintahan pun perlu memperlihatkan kegiatan operasionalnya guna mempertanggung jawabkan atas segala kegiatan yang sifatnya operasional. sehingga dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuannya berjalan dengan baik. dalam hal ini jika sebuah instansi pemerintah manajemen operasionalnya baik, maka akan baik pula dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun tanggung jawabnya kepada pemerintah.

Perkembangan suatu instansi pemerintahan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan audit operasional, audit ini akan menghasilkan informasi bagi manajemen instansi mengenai problema yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan operasional yang memerlukan perbaikan guna mencapai tingkat operasi yang lebih efisien dan ekonomis, jadi sebenarnya audit operasional berorientasi pada usaha peningkatan efisiensi operasi/aktifitas manajemen. sehingga pada usaha peningkatan efisiensi operasi/aktifitas manajemen. sehingga nantinya dengan adanya audit operasional manajemen akan bisa menilai apakah kegiatan yang sifatnya operasional yang telah dilaksanakan oleh instansi tersebut sudah efektif, efisien dan ekonomis.

Berdasarkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "prosedur audit operasional terhadap dinas perumahan kawasan, permukiman, dan pertanahan provinsi Sulawesi- selatan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah bagaimana telah di kemukakan diatas,maka dapat dirumuskan permasalahan

- a. Bagaimana prosedur pelaksanaan audit operasional terhadap dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan?
- b. Bagaimana peran auditor pada dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui prosedur audit operasional terhadap dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi sulawesi- selatan.
- b. Untuk mengetahui peran auditor di dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan

4. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan untuk mengetahui pentingnya sistem audit operasional terhadap dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pentingnya peran auditor. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program pemecahan masalah .

c. Kebijakan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam penetapan sekaligus sebagai evaluasi kebijakan pada dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi – selatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Audit operasional

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2011) audit manajemen atau audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas prosedur serta metode tersebut.

Willy Susilo (2002: 53), menyatakan: "Audit operasional adalah audit terhadap manajemen suatu organisasi secara keseluruhan untuk menilai unsur-unsur manajemen apakah telah direncanakan, dijalankan dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar sehingga organisasi melalui fungsi-fungsinya dapat mencapai tujuan yang direncanakan yang mencakup dimensi PQCDSE - *Productivity* (produktivitas)- *Quality* (mutu) - *Cost* (biaya) - *Delivery* (waktu penyampaian) - *Safety* (keselamatan) - *Morale* (etos kerja) *Environment* (lingkungan) - secara efektif dan efisien". Pada saat audit operasional Jurnal Akuntansi (JAK) Page 40 dilaksanakan manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan kegiatan operasional. Menurut IBK, Bayangkara (2014:3), dalam buku Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi "Audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi. Dari uraian definisi diatas dapat saya simpulkan bahwa "Audit operasional adalah proses mekanisme manajemen dalam melaksanakan tahap/proses pemeriksaan serta pengendalian secara generik/umum dalam mengoperasikan suatu instansi.

a) Tujuan audit operasional

Audit operasional dimaksudkan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan untuk menghasilkan perbaikan atas pengelolaan program dan pencapaian hasil dari objek yang diperiksa dengan cara memberikan saran-saran mengenai berbagai upaya yang dapat ditempuh untuk mendayagunakan sumber-sumber secara efisien, efektif dan ekonomis. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2000:12), terdapat beberapa tujuan audit operasional:

1. Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor dan untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan terjadi untuk memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan.
2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien.
3. Mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri memiliki pengalaman tentang pengelolaan yang efisien.
4. Audit manajemen bertujuan untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan.
5. Untuk membantu manajemen, audit, atau operasi berhubungan dengan fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan pada manajemen.
6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.

Sukrisno Agoes (2009:150) berpendapat tujuan audit operasional adalah:

1. Untuk menilai kinerja (*performance*) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam instansi.
2. Untuk menilai apakah berbagai sumber daya yang dimiliki telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Untuk menilai efektivitas dalam mencapai tujuan (*objective*) yang telah ditentukan oleh *top management*.
3. Untuk dapat memberikan rekomendasi kepada *top management* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penetapan-penetapan intern, sistem pengendalian manajemen, serta prosedur operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi, ekonomi, dan efektivitas dari kegiatankegiatan operasional.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran audit manajemen adalah aktivitas, program atau bidang-bidang organisasi yang diketahui atau diidentifikasi memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam hal efektivitas, efisiensi, dan ekonomisnya.

b) Manfaat audit operasional

Manfaat yang dapat diperoleh dari audit manajemen menurut Reider (2013:17)

1. Mengidentifikasi area permasalahan, penyebab yang terkait dan alternatif untuk perbaikan.
2. Memunculkan kesempatan untuk menghilangkan inefisiensi, yang akhirnya akan menuju pada pengurangan biaya.
3. Memunculkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan (*revenue*), yang berarti perbaikan *income*.

4. Mengidentifikasi tujuan, kebijakan dan prosedur yang belum terdefinisikan.
5. Mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan .
6. Merekomendasikan perbaikan kebijakan, prosedur maupun struktur
7. Menyediakan pengujian kriteria individual maupun unit instansi tersebut.
8. Melihat kepatuhan tujuan, kebijakan, prosedur dan kegiatan organisasi apakah telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
9. Menguji eksistensi dari tindakan yang telah diotorisasi, adanya kecurangan maupun penyelewengan tindakan. Menilai sistem pengendalian dan informasi manajemen apakah telah memadai.
10. Mengidentifikasi kemungkinan kesulitan yang akan dihadapi dalam operasi di masa yang akan datang.
11. Menyediakan tambahan saluran komunikasi antara manajemen puncak (*top level*) dengan manajer tingkat operasional (*lower level*).
12. Menjadi alat bantu untuk mengevaluasi kegiatan operasi perusahaan yang independen dan obyektif.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat dari audit operasional adalah membantu manajemen mengefektifkan dan mengefisiensikan kinerja fungsi departemen untuk mengambil keputusan.

c) Ruang Lingkup Audit operasional.

Ruang lingkup audit operasional meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. ruang lingkup tersebut dapat mencakup seluruh kegiatan/ program atau hanya mencakup bagian/elemen/dimensi tertentu dari suatu kegiatan atau program (BPKP, 2014:7)

Sasaran audit operasional adalah kegiatan, aktivitas, program atau bidang bidang organisasi yang diketahui dan diidentifikasi memerlukan perbaikan /peningkatan dalam segi kehematan, efisiensi, dan efektifitasnya. Sasaran pemeriksaan tersebut harus mempunyai 3 unsur pokok yaitu:

a) Kriteria

Kriteria yang jelas berupa standar /ukuran, ketentuan yang seharusnya diikuti atau ditaati.

b) Penyebab

Penyebab dari suatu tindakan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria.

c) Akibat

Akibat dari satu tindakan, atau kegiatan yang menyimpang dari kriteria yang dapat diukur /atau dinilai dengan uang atau akan menyebabkan tidak dicapainya sasaran dan tujuan yang seharusnya dicapai (BPKB1, 2009:7).

2. Prosedur pelaksanaan audit operasional

a. Persiapan audit

Persiapan audit bertujuan untuk mengumpulkan informasi, penelaahan peraturan, ketentuan dan undang-undang yang berkaitan dengan aktifitas yang di audit serta menganalisis informasi yang diperoleh guna mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung titik kelemahan. Pada tahap ini auditor memilih bidang tertentu untuk diaudit dari seluruh bidang obyek kegiatan yang telah ditentukan pada tahap persiapan audit. Pemilihan ini diperoleh melalui pengumpulan dan penganalisaan informasi atas kegiatan yang diperiksa. Dari tahap ini diperoleh latar belakang dan informasi umum

atas kegiatan bersangkutan, yang mendasari pemilihan sasaran tentative pemeriksaan melalui berbagai tehnik dan pengujian terbatas. (BPKP, 1992:8).

Menurut Bayangkara (2008: 10) ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan audit operasional, yaitu:

a) Tahap audit Pendahuluan

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang diaudit. Pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan terkait.

b) Tahap review dan pengujian pengendalian manajemen

Pada tahap ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit, dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

c) Tahap Audit Terinci.

Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antara satu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit.

d) Tahap Pelaporan

Tahap ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk menyakinkan pihak manajemen (objek audit) tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan.

e) Tahap Tindak Lanjut.

Sebagai tahap akhir dari audit operasional, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut (pebaikan) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

b. pengujian pengendalian operasional

Pengujian pengendalian manajemen adalah pengujian terhadap segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengarahkan atau menjalankan operasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengujian pengendalian manajemen dimaksudkan untuk lebih memantapkan sasaran tentative pemeriksaan yang telah diidentifikasi pada tahap persiapan pemeriksaan. pengujian pengendalian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dan lebih mengenali adanya kelemahan sehingga dapat dipastikan apakah suatu alternatif audit obyektif dapat terus dilanjutkan pada tahap pemeriksaan lanjutan, karena kurangnya bukti pendukung.

melalui tahap ini diperoleh bukti bukti yang mendukung sasaran pemeriksaan definitive yang dikembangkan dari kegiatan spesifik yang masih bersifat sementara. auditor yang menetapkan alternatif kegiatan spesifik sementara lainnya. dalam banyak hal akhir tahap ini dibuat laporan sementara berupa laporan /ikhtisar hasil survei. apabila pemeriksaan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan, maka pada tahap ini juga dibuat program kerja audit (BPKB, 2014:9).

Setelah melakukan pemeriksaan dan menilai system pengendalian dalam penerangan tujuan pokok, kemudian auditor akan melaksanakan pengujian yang tepat untuk menentukan kalau penyajian pengendalian adalah merupakan operasi yang dimaksud. pengujian pengendalian meliputi verifikasi

terhadap purchase order didukung oleh dokumen dan spesifikasi otorisasi yang benar. review terhadap operasi dari praktik-praktik manajemen (sawyer,2011:36).

c. Pemeriksaan lanjutan

Pemeriksaan lanjutan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti bukti yang cukup, guna mendukung sasaran definitif pemeriksaan yang telah diperoleh pada tahap pengujian dan pengajian ulang sistem pengendalian manajemen. pada tahap ini auditor memilih sasaran definitif, kemudian dilakukan pengumpulan bukti, yang relevan, material, dan kompeten, menuju suatu kesimpulan mengenai sasaran audit yang bersangkutan. hal ini dilakukan dalam pemeriksaan terinci.

Oleh karenanya semua program audit pada tahap ini pada umumnya diarahkan kepada 4 sasaran.

- a) Informasi latar belakang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- b) Hasil akhir yang diharapkan.
- c) Prosedur audit yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- d) Instruksi-instruksi khusus apabila diperlukan.

Bukti yang diperoleh disini termasuk bukti yang diperoleh pada tahap sebelumnya. bukti yang dikumpulkan dari hasil pemeriksaan terinci diikhtisarkan dalam kertas kerja yang cukup untuk mendukung kesimpulan laporan hasil audit. berdasarkan bukti yang sudah diikhtisarkan dalam kertas kerja, dibuat laporan akhir hasil pemeriksaan, termasuk kesimpulan dan rekomendasi.

Bukti yang harus memenuhi kualitas dan mempunyai tingkat kepercayaan yang memadai, untuk itu harus selalu memperhatikan empat unsur:

a) Relevan

Bukti harus mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diperiksa.

b) Kompeten

Bukti diperoleh dari sumber yang independen yang dapat dipercaya.

c) Cukup

Bukti yang dikumpulkan dinilai cukup memadai berdasarkan pertimbangan professional untuk mendukung kesimpulan pemeriksa.

d) Material

Bukti harus mempunyai nilai yang cukup berarti dalam mempengaruhi tingkat pertimbangan informasi yang bersangkutan.

1. Pengembangan temuan dalam pemeriksaan lanjutan

Pengembangan Temuan adalah pengumpulan dan sintesa informasi khusus yang bersangkutan dengan kegiatan atau program yang diperiksa, yang dievaluasi dan dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pemakai laporan. Setelah melaksanakan pengembangan temuan, kemudian auditor menyusun rekomendasi guna perbaikan kelemahan dalam manajemen. Dalam penyusunan rekomendasi untuk manajemen, auditor harus melihat masalah-masalah itu sebagaimana manajemen melihat masalah tersebut. Auditor harus membebaskan keuntungan dari perlindungan yang diberikan oleh penembanan pengendalian terhadap biaya yang terjadi. Auditor harus mempertimbangkan perluasan risiko dari jumlah kerugian yang besar

(Sawyer,2011:32).

2. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan

Kertas kerja adalah catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilaksanakannya, informasi yang diperolehnya, simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya (Mulyadi,2009:100).

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan-catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan.

d. pelaporan hasil audit

Hasil akhir dari pelaksanaan audit operasional berupa laporan tertulis yang ditujukan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan advis pemecahan masalah yang difokuskan pada usaha peningkatan prosedur dan pelaksanaan pelaksanaan operasi dan juga ditujukan nilai uang yang dapat dihemat jika dilaksanakan aktivitas yang benar serta peningkatannya (Johny,2014:4).

Penulisan laporan hasil audit oprasinal tidak banyak berbeda dari penulisan laporan bermacam-macam audit lainnya, yaitu laporan harus nyata, jelas, bersih, menyeluruh dan persensitive. Dalam beberapa situasi, laporan suatu audit operasional berbeda dari laporan aktivitas keuangan lainnuya, sebab ada dua bagian yaitu pokok masalah pemeriksaan dan tingkat penerimaan bahwa operasi auditor menyenangkan dalam perusahaannya (Sawyer,2011:37).

3. Peran Auditor

Auditor termasuk suatu kelompok jabatan fungsional. Dalam jabatan fungsional auditor terdapat tim mandiri yang terdiri dari: Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim. Berdasarkan pernyataan tersebut, setiap pelaksanaan tugas pengawasan (audit) tim mandiri memiliki peran-peran sebagai berikut

- a) Pengendali Mutu, merupakan Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli Utama yang bertanggung jawab atas mutu hasil kegiatan.
- b) Pengendali Teknis, merupakan Auditor Ahli Muda atau Auditor Ahli Madya yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kegiatan
- c) Ketua Tim, merupakan Auditor Ahli Pratama atau Auditor Ahli Muda yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya.

B. Peneliti Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

- a. penelitian Rusydina alfiah (2018) dengan judul "Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Studi Pada Kantor Akuntan Publik XYZ" persamaan dengan penelitian ini adalah variabel yang diteliti berkaitan terhadap audit laporan keuangan, dan hasil dari penelitian ini telah sesuai dengan desain perencanaan audit KAP XYZ, dan desain perencanaan audit KAP XYZ telah sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu SPAP..
- b. penelitian Djohariah Sarapa (2017) dengan judul "Audit Manajemen Atas Fungsi Keuangan Pada PT. Megahputra Sejahtera Makassar persamaan dengan penelitian ini adalah salah satu variable mencari interpretasi sejauh

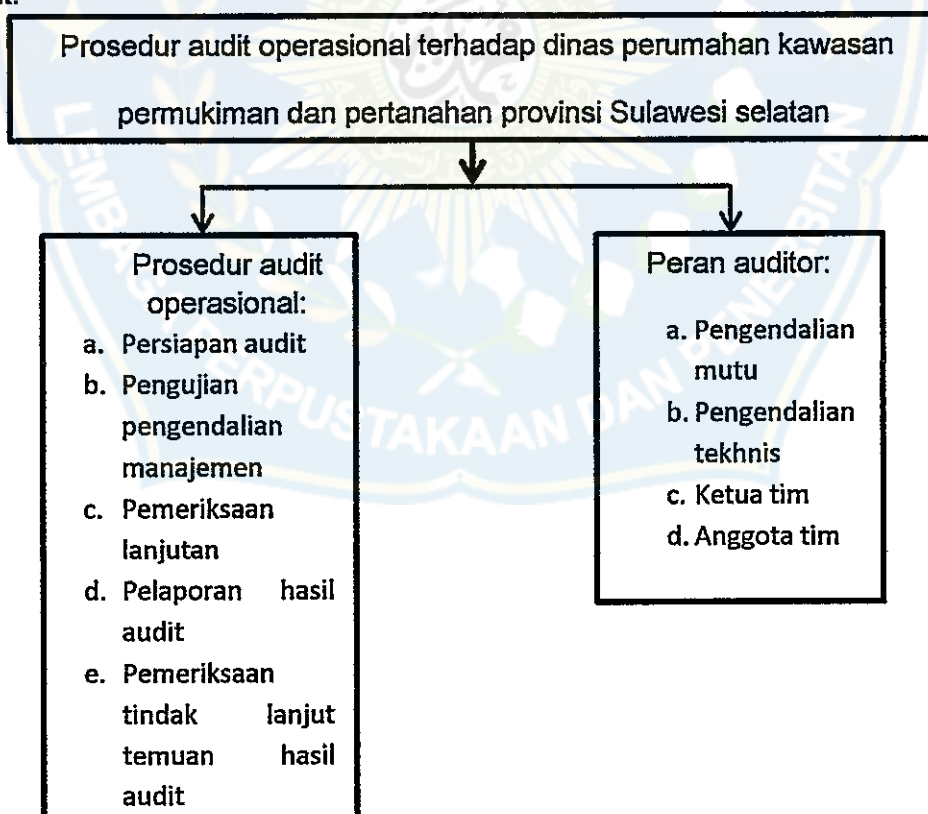
mana audit manajemen atas fungsi keuangan, dan hasil penelitian ini bertolak belakang dari penelitian yang dilakukan dalam arti kata audit manajemen atas fungsi keuangan belum memenuhi kriteria dan standar yang berlaku karena penelitian yang dilakukan masih banyak melakukan penyimpangan sehingga menimbulkan audit manajemen kurang efektif dan efisien.

- c. Penelitian Hasan Basri (2011) dengan judul "Pengaruh Dimensi Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Auditor di KAP Kota Makassar)". Persamaan dengan penelitian ini adalah salah satu variabel yang menjadi subyek yaitu auditor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap aturan profesi, hubungan dengan sesama profesi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas auditor.
- d. Penelitian Ni Ketut Riski Agustini, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2016) dengan judul "Pengaruh Tekanan Ketaatan, Senioritas Auditor dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Audit *Judgment*". Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa bahwa tekanan ketaatan dan tekanan anggaran waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit *judgment*, sedangkan senioritas auditor tidak berpengaruh terhadap audit *judgment*.
- e. Penelitian Moermahadi Soerja Djanegara (2001) dengan judul "Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Persamaan dengan penelitian ini adalah salah satu variabel objek yaitu pengelolaan keuangan Negara. Hasil analisis dengan metode regresi (*least square method*) menunjukkan bahwa tindak lanjut perbaikan atas

kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan, pengendalian pelaksanaan anggaran, struktur pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji prosedur Audit operasional terhadap dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi sul-sel. Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian seperti tersaji dalam gambar berikut:



GAMBAR 2.1 Kerangka fikir

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Diduga bahwa dengan adanya audit operasional manajemen akan bisa menilai apakah kegiatan yang sifatnya operasional yang telah dilaksanakan oleh instansi tersebut sudah efektif, efisien dan ekonomis.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. jenis penelitian

Jenis penelitian yang saya lakukan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu objek penelitian. Dengan melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap dan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

2. fokus penelitian

Moleong (2004:237) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada bagaimana prosedur audit manajemen terhadap DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

3. Lokasi dan situs penelitian

a) Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di KANTOR DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

b) Waktu penelitian

Penelitian dilakukan selama waktu yang telah ditetapkan.

4. Sumber data

Menurut Satori dan Komariah (2010:50) dalam penentuan sumber data pada penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan secara purposive. Menurut Ferdinand (2006:195) *purposive sampling* adalah penentuan sampel dimana

peneliti memilih sampel secara subjektif. Pemilihan sampel ini dilakukan karena mungkin saja peneliti telah memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu kelompok atau sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki karena mereka memang memiliki informasi seperti itu dan mereka memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Sedang menurut Satori dan Komariah (2010:47) purposive sampling adalah menentukan subjek atau objek sesuai tujuan.

5. Pengumpulan data

Menurut Narimawati (2008:98) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli/pertama, data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber/dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan saran untuk mendapatkan informasi atau data.

menurut sekaran (2007:77) data yang diperoleh melalui sumber yang ada disebut data sekunder, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti.

6. Instrumen penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap. Adapun penjelasan dari teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan

dengan responden. Teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka atau komunikasi secara langsung antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara lisan (Supomo dan Indriantoro, 2002:152). Proses wawancara dilakukan pada sela-sela waktu kerja dan dilakukan di Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan. Proses wawancara dilakukan secara semi formal, oleh karena itu hasil wawancara tidak di rekam karena percakapan juga berhubungan dengan proses audit pada klien tersebut. Namun, untuk menunjang keabsahan proses wawancara, dibutuhkan berita acara dengan tanda tangan subjek yang diwawancarai serta dilampirkan pertanyaan yang diajukan kepada subjek wawancara.

b. Teknik observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek atau orang, objek atau benda, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Teknik observasi dalam penelitian dapat dilakukan dengan observasi langsung. Penggunaan teknik observasi langsung memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Peneliti dalam observasi langsung tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati (Supomo dan Indriantoro, 2002:157).

tujuan observasi adalah untuk memahami perilaku dan kejadian-kejadian dalam lingkungan sosial. Teknik observasi lingkungan sosial yang digunakan peneliti yaitu *participant observation*. *Participant observation* merupakan teknik observasi dengan cara melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Teknik yang digunakan untuk

mengumpulkan data adalah kombinasi antara observasi langsung dan wawancara secara formal maupun nonformal (Supomo dan Indriantoro, 2002:158). Observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengikuti proses audit mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

c. Dokumentasi

Data dapat diperoleh dengan cara menelaah dokumen. Berdasarkan sumbernya, dokumen dapat diklasifikasikan sebagai dokumen yang bersifat personal, privat, atau publik (Payne dan Payne dalam Sarosa, 2012: 62). Dokumen personal adalah dokumen yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau individu. Contoh dokumennya adalah surat pribadi, buku harian, catatan, buku, dan lainnya. Dokumen privat adalah dokumen yang dihasilkan oleh organisasi atau institusi untuk kepentingan internal. Contoh dokumen privat antara lain notulen rapat, memo, anggaran, catatan kepegawaian, dan lainnya. Dokumen publik adalah dokumen yang dibuat untuk konsumsi umum. Contoh dokumen publik antara lain artikel di media massa, laporan tahunan, *press release*, dan lainnya (Sarosa, 2012: 62). Data yang digunakan berupa data primer yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan audit laporan keuangan. Selain itu, data sekunder yang digunakan dengan memeriksa secara teliti dan mendalam atas dokumen dan catatan yang berhubungan dengan perencanaan audit laporan keuangan.

7. metode analisis

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dari metode ilmiah. Menurut Supomo (2002 :13), data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Untuk menganalisis data kualitatif digunakan

metode analisis data deskriptif (analisis data non statistik) dengan teknik komparatif yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada pada perusahaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi-Selatan

Dinas pekerjaan umum berdiri sejak zaman belanda,dahulu bernama PW dan kini telah menjadi Dinas tata ruang dan permukiman provinsi Sulawesi selatan ini merupakan salah satu instansi dibawah naungan departemen pekejaan umum yang berkedudukan dijakarta sebagai pusat dan perkembangan PU hingga dewasa ini dapat dibagi dalam beberapa tahap,yaitu:

a. Tahun 1945 sampai tahun 1964

Merupakan tahap awal dengan perkembangan yang masih sangat rawan,pada tahap ini selain dapat membangun sarana jalan,gedung gedung maupun untuk kepentingan para penjajah yang ada di wilayah RI,dengan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi-selatan.

b. Tahun 1964 sampai tahun 1970

Merupakan tahap selanjutnya karena pada tahap ini dapat dilihat perkembangan yang sedikit mengembirakan karena pada tahun ini departemen pekerjaan umum (PU) telah ditetapkan menjadi bagian dari cipta karya provinsi Sulawesi-selatan.

c. Tahun 1970 sampai tahun 1984

Pada periode ini perkembangan pembangunan dikerjakan oleh dinas pekerjaan umum sangat mengembirakan walaupun pada tahap ini juga dinas pekerjaan umum dituntut untuk selalu meningkatkan sarana

perhubungan dan perumahan, dan tahap ini juga departemen PU mempunyai sebutan sebagai bidang cipta karya yang ada diujung pandang.

d. Tahun 1986 sampai tahun 2001

Pada periode ini dikeluarkan SK Gubernur nomor 241/111/tahun 1991

Tentang pembentukan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sulawesi Selatan yang harus mampu tumbuh berkembang dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu usaha-usaha peningkatan terciptanya pembangunan yang kuat dan ini merupakan basis untuk mewujudkan sarana dan tujuan rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) oleh pemerintah.

e. Tahun 2001 sampai 2016

Sesuai dengan peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan nomor 16 tanggal 31 Januari 2001, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja tata ruang dan permukiman provinsi selatan maka periode ini dinas pekerjaan umum (PU) Cipta Karya berganti nama menjadi Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

f. Tahun 2017 sampai sekarang

Berubah nama menjadi dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tujuan didirikannya dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan didirikannya dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk mensejahterakan warga Negara dan masyarakat bangsa Indonesia karena adanya dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi Selatan yang

berfungsi sebagai perangkat pemerintah dan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pembangunan bidang perumahan bagi permukiman serta pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan permukiman melalui kegiatan perumahan dari permukiman yang bersifat desentralisasi maupun dekonsentrasi yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan Oleh Pemerintah Sulawesi Selatan.

3. Visi dan misi organisasi

a. Visi

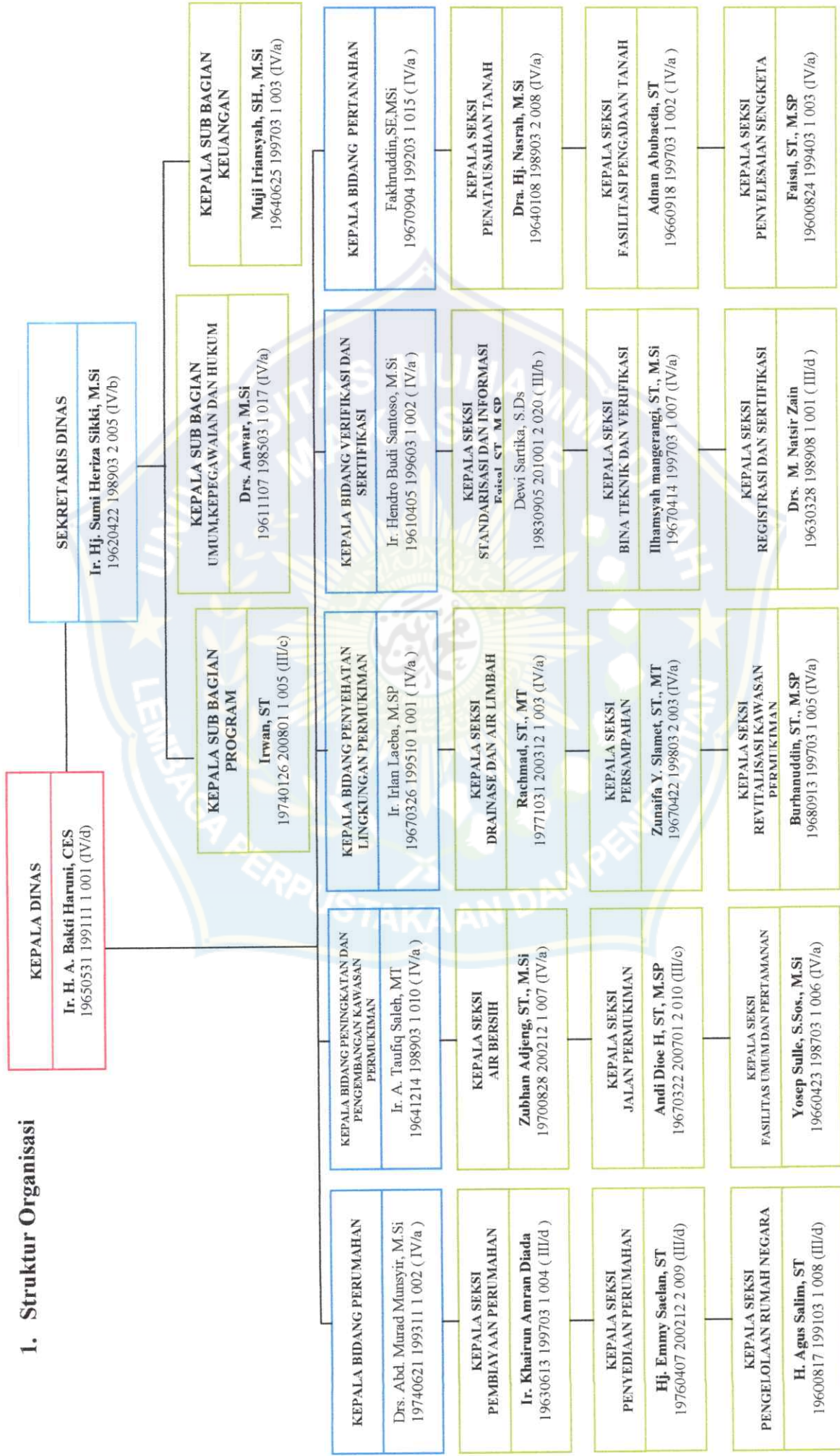
"Terwujudnya Lingkungan Permukiman Dan Perumahan Yang Layak Huni Serta Pengelolaan Tanah Bagi Kemakmuran Masyarakat"

b. Misi

- 1) Mewujudkan kualitas permukiman yang tertib dan sehat berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan pengelolaan tanah yang berkualitas dan berkeadilan.
- 3) Mewujudkan tata kelola administrasi kelembagaan serta kapasitas dan kinerja aparat yang berkualitas.

C. Struktur Organisasi dan Job Description

1. Struktur Organisasi



1. Job description

a. Kepala dinas

Kepala dinas mempunyai tugas dalam membantu gubernur mentyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

b. Sekertaris dinas

Membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan kegiatan memberikan pelayanan teknis dan admininstrasi penyusunan program penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan.

c. Kasubag umum,kepegawaian dan hokum

Membantu sekretaris dalam mengumpulkan dan melakukan urusan ketatausahaan admininstrasi pengadaan,pemeliharaan dan pengapusan barang urusan rumah tangga serta mengelolah admininstrasi kepegawaian dan hukum.

d. Kasubag program

Membantu sekretaris dan mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program,penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan.

e. Kasubag keuangan

Membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengumpulkan pengelolaan admininstrasi dan laporan keuangan.

f. Kepala bidang perumahan

Bidang perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan.

g. Kepala bidang peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman

Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan dibidang kawasan permukiman dan penyiapan bahan penyusunan pogram.petunjuk teknis dan pengordinasian penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan kawasan permukiman.

h. Kepala bidang penyehatan lingkungan permukiman

- 1) Melaksanakan survey, mendata, menginverisasikan dan menginformasiakan wilayah pengembangan.
- 2) Penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah(MBR
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- 4) Menetap lokasi perumahan dan permukiman dan kumuh sebagai perumahan dan permukiman.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denga tugas dan fungsinya.

i. Kepala bidang verifikasi dan sertifikasi

- 1) Menyiapkan bahan dan penyusunan kegiatan pengelolaan verifikasi anggaran.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi pembayaran.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiata pengelolaan verifikasi penggajian.

j. Kepala bidang pertanahan.

Kepala bidang pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelahsanaan kebijakan pengadaan penggunaan dan

penyelesaian sengketa tanah yang meliputi tanah garapan, ganti kerugian tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten.

B. HASIL PENELITIAN

a. Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional Terhadap Instansi Pemerintah Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi-Selatan

1. Persiapan audit

Langkah langkah yang dilakukan dalam audit operasional untuk tahap persiapan audit adalah:

- a. Pengawas bersama-sama tim fungsional auditor mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan obyek audit mengenai tanggung jawab auditor, sasaran audit secara umum dan metode pelaksanaan audit.
- b. Tim melaksanakan langkah langkah kerja yang tersebut dalam program audit (survei pendahuluan) guna mengumpulkan informasi umum tentang obyek audit, cara pelaksanaan prosedur dan sistem yang digunakan untuk kegiatan operasional obyek audit.
- c. Atas dasar informasi yang diperoleh, kemudian tim harus melakukan tes pendahuluan untuk mengidentifikasi aktifitas yang memerlukan perhatian lebih lanjut informasi yang diperoleh dari hasil tes pendahuluan kemudian dituangkan dalam kertas kerja audit. atas dasar kertas kerja audit kemudian tim menetapkan langkah kerja spesifik (program audit) untuk tahap pengujian pengendalian manajemen.

- d. Pengawas audit melakukan review atas hasil tes pendahuluan terhadap informasi yang diperoleh dan kemudian melakukan pembicaraan dengan pimpinan obyek audit mengenai hasil temuan guna memperoleh komentar atau tanggapan.

2. Pengujian Pengendalian Manajemen

Pada dasarnya kegiatan tim fungsional auditor dinas perumahan kawasan permukima dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan pada tahap ini adalah menentukan tingkat resiko penyalahgunaan sumber daya dan melakukan penilaian terhadap penilaian pengendalian manajemen dapun langkah langkah yang harus dilakukan pada tahap pengujian pengendalian manajemen adalah sebagai berikut:

Pertama tim auditor menentukan tingkat penting sesuatu yang ingin dinilai yang merujuk pada item- item,kejadian kejadian informasi hal-hal atau masalah masalah.kemudian menentukan tingkat kepekaan sesuatu yang merujuk pada persepsi yang mungkin timbul dan reaksi erosional oleh pihak-pihak lain terhadap kondisi setiap kasus.

Setelah menentukan tingkat penting dan pekanya,kemudian auditor menilai tingkat resiko yang merujuk pada kecenderungan untuk menyalahgunakan sumber daya, kegagalan mencapai sasaran program,dan ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.untuk menentukan tingkat resiko sebelumnya tim auditor menyiapkan pertanyaan pertanyaan yang melekat pada pokok yang diperiksa dalam pelaksanaanya tim auditor harus memperhatikan beberapa hal antara lain:

- a. Memperhatikan setiap lampu merah yang dilihat dalam informasi mengenai instansi pemerintah yang diaudit
- b. Memperhatikan dukungan dari manajemen apakah manajemen meyakini pentingnya pengendalian pengendalian manajemen dan sudah membuat suatu komitmen untuk mengimplementasikannya.
- c. Memperhatikan tingkat kecukupan para pimpinan dan karyawan dari instansi yang diaudit

Setelah mempertimbangkan unsur unsur diatas kemudian tim menilai apakah tingkat resiko keseluruhan tinggi, sedang ataukah rendah.

Setelah menilai tingkat resiko, tim audit menilai efektivitas sistem pengendalian obyek audit. tim mengidentifikasi dan memahami pengendalian-pengendalian manajemen yang relevan yang meliputi sasaran-sasaran pengendalian prosedur prosedur pengendalian sistem akuntansi. dan sistem pemantauan selanjutnya tim menetapkan apa yang diketahui tentang efektivitas pengendalian dengan mempertimbangkan informasi yang dikembangkan selama penilaian tingkat resiko dan memikirkan apa yang paling mungkin menimbulkan kesalahan.

Kemudian memeriksa pengendalian manajemen apakah pengendalian manajemen tersebut logis, cukup lengkap dan mungkin menghalangi mendeteksi penyalahgunaan yang mungkin terjadi. disamping itu tim juga harus menetapkan apakah pengendalian manajemen tersebut layak digunakan dan apakah transaksi-transaksi didokumentasikan dengan layak juga.

Selanjutnya ketua tim menyusun laporan pengujian pengendalian manajemen dan mendiskusikan hasil termasuk tindakan perbaikan apa yang diperlukan.

3.pemeriksaan lanjutan

Pada tahap pemeriksaan lanjutan ada beberapa langkah yang harus dilakukan tim auditor dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan.timm mengumpulkan tambahan data atau informasi mengenai latar belakang obyek pemeriksaan yang diperlukan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dalam tahap persiapan audit maupun pada pengujian dan kaji ulang pengendalian manajemen agar memperoleh data yang lengkap dalam menganalisis aktivitas.yang diperiksa,sehingga kesimpulan yang diambil akan berdasarkan pada seluruh data yang tersedia atau aktifitas yang diperiksa.

Selanjutnya tim mencari bukti-bukti yang kompeten, material dan relevan. bukti ini merupakan pendalam atas bukti yang diperoleh selama tahap pemeriksaan sebelumnya. atasa dasar bukti yang dikumpulkan tersebut kemudian tim merumuskan bukti yang relevan terhadap temuan hasil pemeriksaan yang terdiri dari kriteria, penyebab dan akibat.

Selanjutnya atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dari mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian dari kondisi dan kriteria yang cukup penting dan material kesimpulan ini merupakan pematapan temuan hasil audit.

Apabila tim audit menjumpai kelemahan atau kekurangan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan/program yang diperiksa, maka pemeriksa harus menyusun rencana pengembangan semua aspek yang

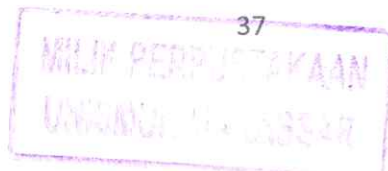
berhubungan dengan masalah tersebut dengan tepat dan segera. Pengembangan temuan ini merupakan proses yang paling penting dalam pelaksanaan audit operasional terhadap instansi pemerintah. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan temuan adalah sebagai berikut:

- a. Tim mengenali secara khusus apa yang kurang dalam hubungan dengan kriteria atau tolak ukur dan auditor harus menyakini kelayakan kriteria tolak ukur yang dipergunakan. Auditor membandingkan apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi atau membandingkan kondisi dengan kriteria.
- b. Selanjutnya tim mengenali batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang diperiksa.
- c. Kemudian tim harus menyelidiki sebab terjadinya keadaan yang merugikan, mengapa hal tersebut terus berlangsung dan bila diadakan prosedur intern untuk menghindari keadaan yang merugikan tersebut, apakah kerugian itu disebabkan prosedur intern diterapkan tidak sepatutnya atau karena tidak efektif.
- d. Disamping itu tim juga harus menentukan apakah kelemahan itu merupakan kasus yang berdiri sendiri atau tersebar luas. Bila auditor yakin bahwa kondisi itu tersebar luas atau besar kemungkinannya akan berulang kembali, maka auditor harus merekomendasikan perbaikan kesalahan tersebut secepat mungkin.
- e. Selanjutnya auditor juga harus mempertimbangkan dengan sepenuhnya akibat atau arti pentingnya kelemahan dengan mengikuti atau menelusuri cara manajemen melaksanakan kegiatannya.

- f. Kenali dan cari pemecahan persoalan hukum kemudian dilakukan perbaikan secara sah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku,.
- g. Usahakan mendapat komentar pejabat atau pihak yang secara langsung berkepentingan yang mungkin akan mengalami akibat negatif oleh pelaporan temuan tersebut. Apabila komentar pendahuluan sudah diterima, kemudian diadakan perubahan penting dalam temuan atau rekomendasi, maka kepada pejabat atau pihak yang terkena harus diberi kesempatan lagi untuk memberikan komentarnya sebelum laporan diterbitkan.
- h. Selanjutnya temuan dan rekomendasi yang telah disetujui oleh instansi pemerintah yang diaudit agar dimintakan kesanggupan melakukan tindak lanjut perbaikan. Komitmen tersebut berbentuk keterangan tertulis yang antara lain menetapkan kapan tindak lanjut atau rekomendasi akan dilaksanakan. Atas dasar komitmen tersebut monitoring pelaksanaan setiap rekomendasi akan lebih efisien.

4. Pelaporan Hasil Audit

Atas dasar Kertas Kerja Pemeriksaan, ketua bersama dengan tim menyusun Laporan Hasil Audit. Laporan Hasil Audit terdiri atas Kertas Kerja Pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan atas kelemahan pengendalian dari Instansi Pemerintah yang diaudit. Dalam penyusunan laporan hasil audit operasional terhadap instansi pemerintah tim auditor fungsional dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan mengacu pada Standar. Adapun isi dari Standar Pelaporan Pemeriksaan Tersebut adalah sebagai berikut :



- a. Laporan pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan pemeriksaan harus dibuat segera sesudah selesai pekerjaan pemeriksaan dan di sampaikan kepada pejabat yang berkepentingan tepat pada waktunya.
- c. Tiap laporan pemeriksaan harus memuat tujuan ruang lingkup dan sasaran pemeriksaan, disusun dengan baik, menyajikan informasi yang layak, serta pernyataan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintahan.
- d. Setiap laporan hasil pemeriksaan oprasional harus :
 1. Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif serta rekomendasi yang konstruktif
 2. Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan dari pada kritik
 3. Mengungkap hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan.
 4. Megemukakan penjelasan pejabat obyek yang diperiksamengetai hasil pemeriksaan.
 5. Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif serta rekomendasi yang konstruktif
 6. Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan dari pada kritik

7. Mengungkap hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan.
8. Megemukakan penjelasan pejabat obyek yang diperiksa mengenai hasil pemeriksaan.
- e. Setiap laoran pemeriksaan yang menyatakan pendapat kewajaran laporan keuangan.

Dalam Pelaporan Hasil Audit ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan. Langkah tersebut meliputi :

- a. Konsep Laporan Hasil Audit harus di susun oleh ketua tim berdasarkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh pemeriksa.
- b. Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada Pengendali Teknis, selanjutnya Pengendali Teknis menyerahkan kepada Pengendali Mutu atau Kepada Kepala Bidang.
- c. Setelah direview kemudian Konsep Laporan Hasil Audit diserahkan kepada Kepala Perwakilan dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan untuk disetujui dan di gandakan.
- d. Konsep Laporan Hasil Audit yang sudah digandakan dan ditandatangani oleh Kepala dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan.kemudian diserahkan kepada Instansi yang di audit dan yang lainnya dikirim ke dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan Pusat.

“ Berdasarkan hasil wawancara pada bapak Ilham S.Arief tanggal 20 agustus 2019 selaku auditor pemprov Sulawesi selatan menyatakan bahwa penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah (gubernur) atas dasar inilah inspektorat melaksanakan audit operasional terhadap perangkat daerah (PD) dilingkup pemerintah provinsi Sulawesi-selatan yang pelaksanaannya berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.Audit diawali dengan pengujian tim pemeriksa,selanjutnya tim pelaksana survey/pemeriksaan pendahuluan yang

memberi gambaran permasalahan yang dihadapi hasil dari (SP) selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan program kerja pemeriksaan sebagai pedoman pemeriksaan. Melaksanakan audit rinci/mendalam, (PKP) yang dilaksanakan hasilnya dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Kondisi yang ditemukan selanjutnya dibandingkan dengan kriteria atau aturan yang terkait. Hasilnya di reduksi dalam bentuk temuan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan”.

Begitupun bapak Mulia Santoso, SH sebagai auditor muda, bapak Amrul sebagai PZUPD, Wawan H.A sebagai auditor memberikan respon yang sama dengan kaitan dalam naungan yang sama di inspektorat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa prosedur pelaksanaan audit operasional berdasarkan keputusan kepala daerah, pelaksanaan diawali dengan pengujian tim, selanjutnya tim survey/pemeriksa memberikan gambaran permasalahan, inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan program kerja pemeriksaan sebagai pedoman pemeriksaan, kemudian dibandingkan dengan aturan yang terkait.

C. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam prosedur pelaksanaan audit operasional.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam prosedur pelaksanaan audit operasional dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2019

- “ menurut bapak Ilham S Arief selaku auditor Pelaksanaan pkp terbatas dan ketersediaan data yang tidak segera disiapkan oleh penanggung jawab kegiatan, serta Jumlah hari dan pelaksanaan pemeriksaan tidak sebanding dengan beban dan ruang lingkup pekerjaan yang diperiksa.”
- “ Menurut bapak Mulia Santoso, SH selaku auditor muda, kendala atau hambatan yang dihadapi adalah Kurangnya data fisik lapangan dan Kurangnya kordinasi antara lembaga dan instansi/dinas. Terbatasnya sumber daya manusia/auditor”
- “ Menurut bapak Amrul selaku PZUPD, Keterbatasan waktu pada saat pemeriksaan sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat tidak dapat berjalan dengan maksimal “
- “ Menurut bapak Wawan H.A selaku auditor, bahwa hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana”

Berdasarkan hasil penelitian kendala atau hambatan dalam prosedur pelaksanaan audit operasional pada Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan berdasarkan informasi dari bebeapa narasumber mulai dari ketersediaan data,jangka waktu pemeriksaan,kurangnya data fisik,kurangnya kordinasi,keterbatasan sarana dan prasarana ini memberikan gambaran bahwa perlu adanya sinergitas serta kontribusi yang sifatnya mengurangi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan audit operasional tersebut.

D. Peran auditor pelaksanaan pada dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi selatan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Ilham S Arief selaku Auditor tanggal 20 Agustus 2019 bahwa peran auditor pelaksanaan adalah:

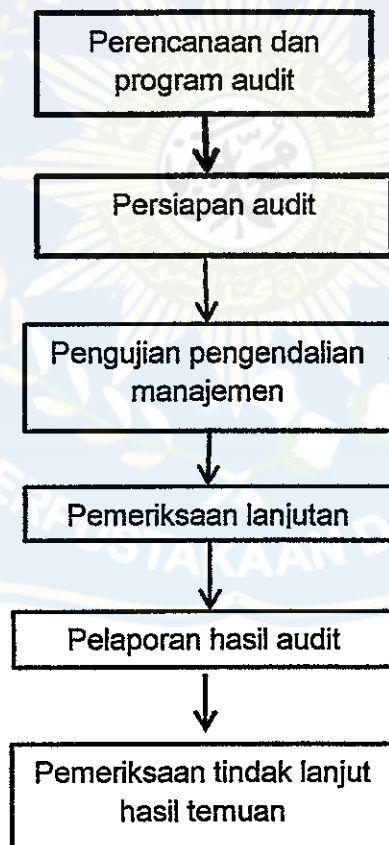
“Pengendali mutu, memberi jaminan terhadap LHP yang dikeluarkan oleh inspektorat,Pengendali tekhnis,menguji kebenaran dan menelaah kesesuaian temuan pemeriksaan dengn PKP beserta bukti bukti terkait,Ketua tim,menyusun LHP berdasarkan KKP masing-masing anggota tim berdasarkan PKP dan Anggota Tim (AT), melaksanakan PKP dengan output berupa KKP yang dilengkapi dengan dokumen bukti pengujian yang telah dilaksanakan”.

Dari uraian hasil penelitian tersebut,dijelaskan peran dari berbagai audior mulai dari pengendali tekhnis,ketua tim dan anggota tim dimana auditor tersebut mempunyai fungsional masing-masing dalam prosedur pelaksanaan audit operasional pada dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan.

E. Pembahasan

1. Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional Terhadap Instansi Pemerintah Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi-Selatan.

Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional Terhadap Instansi Pemerintah Pada Kantor dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan dapat digambarkan pada bagan dibawah ini:



Gambar 4.2. Bagan Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional Terhadap Instansi Pemerintah Pada Kantor dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi- selatan.

Sebelum pelaksanaan audit operasional terhadap Instansi Pemerintah dimulai pengandali mutu membuat perencanaan kegiatan pengawasan yang disusun menjadi program pengawasan yang kemudian mengkomunikasikan program pengawasan tersebut dengan Pengendali Teknis (PT) dan Ketua Tim (KT). Audit operasional terhadap instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kantor dinas perumahan kawasan permukiman dan opertanahan provinsi Sulawesi-selatan meliputi lima tahap. Tahap yang pertama adalah Persiapan Audit. Pada tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum tentang instansi yang diaudit. Dari informasi yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan tes pendahuluan guna mengidentifikasi aktivitas yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Tahap ketiga yang dilaksanakan adalah Pemeriksaan Lanjutan. Pada tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan data untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari tahap sebelumnya. Tambahan data ini berupa bukti-bukti yang kompeten, relevan dan material yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang penting dalam pelaksanaan program dari instansi pemerintah yang diaudit. Selanjutnya diadakan pengembangan temuan atas hasil pemeriksaan sebelumnya. Pengembangan temuan dalam tahap ini merupakan proses yang paling penting dalam pelaksanaan audit operasional. Yang dilaksanakan dalam pengembangan temuan adalah melakukan perbandingan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Atas dasar pengembangan hasil dari pengembangan temuan tersebut kemudian dibuat rekomendasi untuk melaksanakan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada.

Tahap selanjutnya adalah Pelaporan Hasil Audit. Pada tahap ini tim melaporkan atas hasil dari pemeriksaanya. Laporan audit disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang telah dibuat oleh Auditor. Di samping itu Laporan Hasil Audit berisi daftar rekomendasi perbaikan atas kelemahan pada manajemen instansi yang diperiksa. Dalam menyusun Laporan Auditor mengacu pada Standar Pelaporan Pemeriksaan APFP.

Tahap yang terakhir pada pelaksanaan audit operasional terhadap instansi pemerintah yang dilakukan dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan adalah Pemeriksaan Tindakn Lanjut Temuan Hasil Audit. Pada tahap ini auditor melakukan penilaian terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh instasi pemerintah yang diaudit atas rekomendasi perbaikan temuan hasil audit. Pemeriksaan pada tahap ini ditekankan apakah telah atau belum diambil tindak lanjut yang memadai dan cukup meyakinkan bahwa rekomendasi akan tercapai.

Pada dasarnya Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional Terhadap Instansi Pemerintah Pada dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi selatan sudah cukup bagus. Terbukti dengan adanya beberapa tahap yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Audit operasional yang telah terprogram sehingga kualitas dari laporan hasil audit yang dihasilkan dapat diandalkan.

2. Peran Aditor Dalam Pelaksanaan Audit Operasional Terhadap Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi agar tujuan kegiatan tercapai. Salah satu faktor tersebut adalah sumber daya manusia yang handal. Begitu juga dalam pelaksanaan audit operasional, dibutuhkan auditor yang kompeten dan memiliki peran yang maksimal. Peran auditor dalam pelaksanaan audit operasional terhadap instansi pemerintah pada dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan tergolong sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh instansi Pusat. Hal ini dapat dilihat adanya tim mandiri dalam jabatan fungsional auditor di Bidang Instansi Pemerintah Pusat pada dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan dalam pelaksanaan audit operasional terhadap instansi pemerintah. Tim mandiri tersebut terdiri dari pengandali mutu, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim. Setiap anggota tim mandiri memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda sesuai dengan jabatannya. Sehingga dalam pelaksanaan audit operasional berjalan dengan baik dan tujuan yang diharapkan tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pelaksanaan Audit Operasioanal terhadap Instasi Pemerintah yang dilaksanakan oleh dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan meliputi lima tahap yaitu : Persiapan Audit, Pengujian Pengendalian Manajemen, Pemeriksaan Lanjutan, Pelaporan Hasil Audit, dan Pemeriksaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit.
2. Peran auditor berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa Pengendali mutu, memberi jaminan terhadap LHP yang dikeluarkan oleh inspektorat, Pengendali tekhnis, menguji kebenaran dan menelaah kesesuaian temuan pemeriksaan dengan PKP beserta bukti bukti terkait, Ketua tim, menyusun LHP berdasarkan KKP masing-masing anggota tim berdasarkan PKP dan Anggota Tim (AT), melaksanakan PKP dengan output berupa KKP yang dilengkapi dengan dokumen bukti pengujian yang telah dilaksanakan".

B. Saran

Dari hasil observasi dan praktek yang dilakukan oleh penulis pada dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Ir.H.A.Bakti Haruni, CES selaku Kepala dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi Sulawesi-selatan diharapkan meningkatkan sinergitas dalam melaksanakan audit operasional terhadap

instansi tersebut sehingga tercipta instansi pemerintah yang baik, bersih dan terhindar dari KKN.

2. Penulis, diharapkan dapat mengembangkan penelitian baru berdasarkan hasil penelitian ini sehingga aspek kecakapan brbahasa lainnya yang belum terfasilitasi pengukurannya dapat diteliti agar dapat lebih baik dan dapat lebih bermanfaat lagi.





120191914211201

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 20876/S.01/PTSP/2019
Tempat :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kantor Inspektorat Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2725/05/C.4-VIII/VII/1440/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AKMALUL KHAIR**
Nomor Pokok : 10572555515
Program Studi : Manajemen
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PROSEDUR AUDIT OPERASIONAL TERHADAP DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 Agustus s/d 03 Oktober 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 31 Juli 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

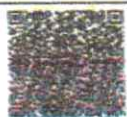
Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringatan.

SIMAP PTSP 08-08-2019



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222



DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta
- Agoes, Sukrisno 2009. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik* Jilid II. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Trisakti.
- Amin Widjaja Tunggal. (2000). *Manajemen Audit Suatu Pengantar*. Jakarta:
- Amin, Widjaja Tunggal, 2008, *Audit Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Augusty, Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bambang Supomo dan Nur Indrianto. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: BPKP
- BPKP. 2014. PO. *Pedoman Pementauan Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional*.
- BPKP. 2014. UF. *Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut* Erlangga.
- Glynn, J. J. (1993) *Public Sector Financial Control and Accounting*. 2nd Ed. Oxford: Blackwell.
- IBK. Bayangkara, 2014, *Audit Manajemen prosedur dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ira Sri Lestari (2014) dengan judul " *Audit Manajemen Sebagai Sarana Untuk Menilai Efektifitas Fungsi Sumber Daya Manusia (Studi Kasus pada CV Rimba Sentosa, Sukoharjo)*. Jakarta: BPKP.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI: Yogyakarta
- Moleong Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi 2009. *Auditing I*. Jakarta: Salemba Empat. *Pengawasan*. Jakarta: BPKP.
- Pramudya Nur Annisa (2016) dengan judul " *Pengaruh Audit Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan di Rumah Sakit Umum Purbowangi Kabupaten Kebumen*, Universitas Negeri Yogyakarta. PT. Rineka Cipta.

- Reider, Rob. (2013). *Operational Review: Maximum Result at Efficient Cost*
- Sarosa, S. (2012). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Sawyer, Lawrence B. 2011. *Operational Auditing*. Terjemahan BPKP. Jakarta:
- Setyawan, Johny. 2014. *Pemeriksaan Kinerja*. Yogyakarta: BPFE.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Audit Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukrisno Agoes. (2009). *Bunga Rampai Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit BFEE UGM.
- Willy Susilo, 2002. *Audit SDM*, Penerbit PT. Vorqistatama Binamega, Jakarta.
- Winda Fridati, Analisis Hubungan Antara Profesionalisme Auditor Dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, , Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Yogyakarta: BPFE.

BIOGRAFI PENULIS



Akmalul Khair panggilan Akmal lahir di Sinjai pada tanggal 06 April 1996 dari pasangan suami istri Bapak Hasbullah dan Normi. Peneliti adalah anak kedua dari 3 bersaudara. peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln Sultan Alauddin 1.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD 173 patohoni lulus tahun 2009, SMP negeri 1 Sinjai selatan lulus tahun 2012, SMA Negeri 1 Sinjai selatan lulus tahun 2015, dan masuk kuliah di universitas muhammadiyah pada tahun 2015 sampai terbitnya skripsi ini.

